Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)
YUDHA YUSTIKA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Rusdi, Robyn Ann Pilcher, dan Brian Perrin. 2015. "Implementing Performance Measurement Systems: Indonesian Local Government Under Pressure." *Qualitative Research in Accounting and Management* 12 no. 1 (2015): 3-33. Diakses pada 1 Oktober 2019. http://dx.doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013.

Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2007. *Management Control Systems*. Edisi 12. Boston: McGraw-Hill.

Baird, Kevin, Herberth Schoch, dan Qi James Chen. 2012. "Performance Management System Effectiveness in Australian Local Government." *Public Accounting Reviu* 24, no. 2 (2012): 161-185. Diakses pada 25 September 2019. http://dx.doi.org/10.1108/01140581211258461.

Bento, Al dan Regina Bento. 2006. "Factors Affecting the Outcomes of Perfoamnce Management Systems." *AMCIS* (2006): Proceedings 7. Diakses pada 26 September 2019. http://aisel.aisnet.org/amcis2006/7.

Cresswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Los Angeles: Sage Publication.

DiMaggio, Paul J. dan Walter W. Powell. 1983. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields." *American Sociological Reviu* 48 no. 2 (April 1983): 147-160. Diakses pada 4 Oktober 2019. http://www.jstor.org/stable/2095101.

Hartono, Jogiyanto. 2018. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. Los Angeles: SAGE Publication.

Hood, Christoper. 1991. "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration* 69 (1991): 3-19. Doi: 10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x.

Hood, Christoper. 1995. "The New Public Management" in the 1980s: Variations on a Theme." *Accounting Organizations and Society* 20 no. 2/3 (1995): 93-109.

Inpres No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Presiden Republik Indonesia. 15 Juni.

Jurnali, Teddy dan A.K. Siti-Nabiha. 2015. "Performance Management System for Local Government: The Indonesian Experience." *Global Business Reviu* 16 no. 3 (2015): 351-363. https://doi.org/10.1177/0972150915569923.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
YUDHA YUSTIKA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kemenpan. 2019. "Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai SAKIP AA." 19 Februari. Diakses pada 2 Oktober 2019. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pertama-dan-satu-satunya-pemprov-diy-raih-nilai-sakip-aa.

Latham, Gary P. 2004. "The Motivational Benefits of Goal-Setting." *The Academy of Management Executive* 18 no. 4 (Nov 2004): 126-129. Diakses pada 4 Oktober 2019. http://www.jstor.org/stable/4166132.

Lembaga Administasi Negara. 2011. "Sistem Manajemen Kinerja Organisasi." Pedoman Manajemen Kinerja, April. Diakses pada 20 September 2019. http://lan.go.id/images/RB/PAK-02.pdf.

Locke, Edwin A. dan Gary P. Latham. 2002. "Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation." *American Psychologist* 57 no. 9 (Sep 2002): 705-717. DOI: 10.1037//0003-066X.57.9.705.

Longo, Paul J. 2002. "The Performance Blueprint, an Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: the Case of Performance-Based Contract Management." *Annual Conference of the American Evaluation Association*. Virginia: Educational Resources Information Center.

Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

McLaughlin, J,A. dan Gretchen B. Jordan. 1999. "Logic Models: A Tool for Telling Your Programs Performance Story." *Evaluation and Program Planning* 22 no. 1 (1999): 65-72. https://doi.org/10.1016/S0149-7189(98)00042-1.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakary.

Pemda DIY. 2019. "Penerapan SAKIP Pemda DIY Terbaik se-Indonesia." 19 Februari. Diakses pada 2 Oktober 2019. https://jogjaprov.go.id/berita/detail/7526-penerapan-sakip-pemda-diy-terbaik-se-indonesia.

Pemda DIY. 2019. *Performance Report*. Maret 2019.

Pemda DIY. 2019. "SATRIYA." Diakses pada 19 Oktober 2019. https://jogjaprov.go.id/profil/7-satriya-sebagai-budaya-pemerintahan-di-diy.

Pemda DIY. 2019. "Visi dan Misi." Diakses pada 19 Oktober 2019. https://jogjaprov.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran.

Perda DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakata. Gubernur DIY. 29 Mei.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
YUDHA YUSTIKA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Perda DIY No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. 10 April.

Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur DIY. 8 Januari.

Pergub No. 72 Tahun 2008 Tentang Budaya Pemerintahan. Gubernur DIY. 30 Desember.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri. 25 September.

Permenpan No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2 Juli.

Permenpan No. 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 8 Juni.

Permenpan No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 1 Desember.

Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Presiden Republik Indonesia. 21 April.

Phillips, Cynthia C. dan Lisa Wyatt Knowlton. 2013. *The Logic Model Guidebook*. Edisi Kedua. Phillips.

Sekaran U. dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Edisi 6. New York: Wiley.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 15 Oktober.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemeirntahan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 2 Oktober.

UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Republik Indonesia. 3 September.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)**
YUDHA YUSTIKA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.. Presiden Republik Indonesia. 17 Oktober.